

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah organisasi keuangan yang berfokus pada menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat umum, terutama di wilayah pedesaan dan perkotaan kecil Indonesia. BPR membantu masyarakat yang mungkin sulit dijangkau oleh bank komersial besar untuk mendapatkan layanan perbankan. BPR memiliki tanggung jawab penting untuk menjaga stabilitas dan kesehatan keuangannya sebagai lembaga keuangan yang membantu perekonomian lokal. Peraturan dan standar BPR mungkin berubah sesuai dengan perubahan regulasi perbankan dan ekonomi Indonesia (OJK, 2021). Tujuan umum BPR adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemerataan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Selain itu, BPR membantu mengelola UMKM (Prena & Kusmawan, 2020).

Pidana perbankan banyak terjadi di BPR. Modus yang digunakan termasuk tidak mencatatkan dana nasabah dan membuat permohonan kredit palsu dengan menggunakan data debitur yang tidak disetujui dan nasabah lama yang sudah melunasi kredit. Sebagai bagian dari industri keuangan, industri perbankan memiliki karakteristik yang membedakannya dari jenis bisnis lainnya. Akibatnya, pengawasan bank diperlukan untuk memastikan bahwa

pengelolaannya dilakukan secara sehat dan hati-hati sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan kesadaran anti kecurangan. Ini penting karena industri perbankan sangat rentan terhadap penyimpangan, kejahatan, dan kemungkinan kegagalan sistemik (HukumOnline.com, 2017).

Menurut data dari LPS, ada total sebanyak 118 bank yang mengalami kegagalan dan harus mengalami proses likuidasi atau pembubaran dari 22 September 2005 hingga 31 Desember 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 118 bank tersebut terdiri dari satu bank umum, 104 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan 13 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) (Kencana, 2023). Terdapat sejumlah insiden kecurangan yang terjadi di BPR Surabaya yang seringkali diungkap dalam berita. Sebagai contoh, ada kasus penggelapan yang melibatkan mantan komisaris PT BPR SUB, yang diduga telah melakukan pemindahan dana sebesar Rp 1,5 miliar milik Deposan Susanto dari PT Danora Kakau Internasional (DKI) ke BPR SUB (Setiawati, 2022).

Dalam beberapa kasus, penurunan kinerja BPR dapat menyebabkan pembatalan izin operasional. Beberapa BPR yang kehilangan izin usahanya tidak hanya karena mereka tidak mampu bersaing, tetapi dalam beberapa kasus juga disebabkan oleh tindakan *fraud*, dimana beberapa di antaranya dilakukan oleh orang-orang yang mengurus BPR itu sendiri.

Pada tahun 2017, terdapat kasus yang melibatkan BPR Jatim Cabang Surabaya. Novan Ari Wicaksono, penduduk Jombatan, Kabupaten Jombang, telah ditahan oleh penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Surabaya pada Jumat 3 Maret 2017.

Novan merupakan yang kedua kalinya dalam kasus korupsi yang melibatkan Bank BPR Jatim Cabang Surabaya.

Sebelumnya, Penyidik Pidsus Kejari Surabaya telah menahan Santoso, mantan kepala kantor Kas Rungkut, dalam kasus korupsi terkait kredit fiktif di Bank BPR Jatim. Kerugian negara akibat praktik kredit fiktif ini selama tahun 2013-2014 mencapai Rp 700 juta. Novan, yang berperan sebagai pemohon kredit dengan jaminan fiktif yang di-mark up, diduga bekerjasama dengan pihak oknum Bank untuk memperbesar nilai jaminan. Setelah kredit cair, Novan disebut sengaja tidak membayar angsuran, menyebabkan kerugian bagi Bank yang saham terbesarnya dipegang oleh pemerintah provinsi Jawa Timur (Petisi.Co, 2017).

Adanya fenomena di atas maka sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Cressey (1953) yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Tekanan yang mendorong seseorang untuk melakukan penipuan. Tekanan ini biasanya bersifat finansial, seperti utang yang membebani seseorang, masalah keuangan, atau kebutuhan mendesak untuk uang. Tekanan juga bisa bersifat psikologis, seperti keinginan untuk menjalani gaya hidup yang mahal. Penipuan memiliki peluang terjadi jika ada peluang atau celah dalam sistem atau proses yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan curang tanpa terdeteksi segera. Peluang ini dapat berasal dari kurangnya kontrol internal yang memadai, prosedur yang buruk, atau ketidakmampuan sistem untuk mendeteksi penipuan.

Secara umum, *fraud*, yang berasal dari bahasa Latin, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi penipuan, kecurangan, atau penggelapan. "*Fraud*" adalah pelanggaran yang disengaja atau tindakan yang tidak disengaja yang dilakukan

untuk memperoleh keuntungan secara ilegal dengan menggunakan taktik tertentu atau tipu muslihat yang biasanya tidak dilakukan dengan kekerasan fisik. Tindakan ini dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan organisasi, dan berdampak negatif pada pihak lain (individu, organisasi, atau negara) (Irianto & Novianti 2018, 22).

Salah satu cara yang dapat mencegah *fraud* adalah dengan budaya organisasi yang baik. Budaya organisasi terdiri dari norma, kebiasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berlaku di dalam suatu perusahaan. Norma, kebiasaan, keyakinan, dan nilai-nilai ini dapat mempengaruhi bagaimana sumber daya manusia atau pegawai bertindak atau berperilaku, sehingga berdampak pada kinerja pegawai (Junaidi & Susanti, 2016). Sebuah budaya perusahaan yang sehat dapat mengurangi kemungkinan penipuan karena menumbuhkan rasa kepemilikan dan kebanggaan di antara karyawan (Lisdiono, Salim, & Suwarno,, 2023). Hasil pada penelitian Lisdiono, Salim, & Suwarno, (2023), Rezca, Andreas, & Nasrizal (2022), serta Suh & Shim (2019) membahas budaya organisasi membantu mencegah penipuan. Namun dalam penelitian Priyanto & Aryati (2019) menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Budaya organisasi dapat berjalan dengan baik dengan adanya *good corporate governance*. Dalam konteks manajemen perusahaan, budaya organisasi dan *good corporate governance* (GCG) sangat terkait. Budaya organisasi adalah kerangka kerja yang menetapkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara etis, transparan, dan akuntabel. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, *Good corporate governance* adalah

sistem pengelolaan bank yang didasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Jika *good corporate governance* diterapkan dengan baik, langkah-langkah ini dapat meningkatkan kinerja keuangan BPR selain mencegah kecurangan. Hasil yang didapat dalam penelitian Prena & Kusmawan (2020) membahas penggunaan *GCG*, Sistem *whistleblowing* dan kesadaran *anti-fraud* meningkatkan pencegahan penipuan. Kemudian penelitian Nugroho & Afifi (2022), Lisdiono, Salim, & Suwarno, (2023), Budiantoro, Aprillivia, & Lapae (2022), dan Jannah, (2016) juga membahas penggunaan *GCG* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Disamping itu, hasil pada penelitian Setiawan (2016) membahas implementasi *GCG* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

*Good corporate governance (GCG)* dan *Whistleblowing* saling terkait dalam upaya menciptakan lingkungan bisnis yang etis, transparan, dan akuntabel. *Whistleblowing* adalah pengungkapan oleh pegawai tentang informasi yang dianggap melanggar hukum, peraturan, pedoman praktis, atau pernyataan profesional, atau terkait dengan korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau kesalahan prosedur. Studi tentang sistem *whistleblowing* menunjukkan bahwa variabel bebas tersebut memiliki efek positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* (Prena & Kusmawan 2020). Hasil yang didapat dalam penelitian Megawati & Reskino (2023), Suh & Shim (2019), serta Jannah, (2016) membahas *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan pada penelitian Hanurani (2022) membahas *whistleblowing system* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

Sistem *whistleblowing* berperan kunci dalam membangun kesadaran anti kecurangan di dalam suatu organisasi. Menurut penelitian lain tentang hubungan antara kesadaran anti-penipuan dan tindakan pencegahan penipuan lainnya, kesadaran anti-penipuan berdampak pada upaya pencegahan penipuan. Dengan kata lain, semakin tinggi kesadaran anti-penipuan di kalangan karyawan, semakin banyak upaya yang dilakukan perusahaan untuk mencegah kecurangan (Lubis & Budiwitjaksono, 2022). Kesadaran *anti-fraud* yang efektif selanjutnya dapat meningkatkan kontrol organisasi dalam hierarki dan mengurangi jumlah kecurangan yang terjadi dalam organisasi (Zarefar & Arfan., 2017). Hasil yang didapat dalam penelitian Lubis & Budiwitjaksono (2022), Budiantoro, Aprillivia, & Lapae (2022), Prena & Kusmawan (2020), serta Suh & Shim (2019) membahas kesadaran *anti-fraud* membantu mencegah penipuan.

Penelitian ini didasarkan pada *fraud triangle theory*, yang biasa digunakan dalam audit. Teori *fraud triangle* bertujuan untuk menjelaskan dasar penipuan. Donald Cressey (1953), pendiri teori ini pada tahun 1953, berpendapat bahwa selalu ada alasan di balik segala sesuatu yang dilakukan orang. Penelitiannya berpusat pada apa yang mendorong orang untuk melanggar kepercayaan saat mencari alasan mengapa orang melakukan penipuan.

Berdasarkan fenomena, *research gap* dan keterbaruan penelitian yang tertulis pada penelitian di atas, maka penelitian ini menguji pengaruh dari budaya organisasi, *good corporate governance*, kesadaran *anti-fraud*, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada BPR di Kota Surabaya yang berpedoman dengan teori *fraud triangle*. Selain itu, penelitian ini diperkuat dengan adanya

kebaruan yaitu belum ada yang meneliti pengaruh budaya organisasi, *good corporate governance*, kesadaran *anti-fraud*, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pada BPR di Kota Surabaya. Maka dari itu penelitian ini berjudul “FAKTOR PENDUKUNG PENCEGAHAN *FRAUD* PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT”.

### **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah ada pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud*?
2. Apakah ada pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud*?
3. Apakah ada pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*?
4. Apakah ada pengaruh kesadaran *anti-fraud* terhadap pencegahan *fraud*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud*
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud*
3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*
4. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran *anti-fraud* terhadap pencegahan *fraud*

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan praktis yaitu :

1. Manfaat Teoretis

Sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pencegahan *fraud*, serta memperoleh penjelasan dengan fakta.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan referensi dalam penyajian untuk yang akan datang.
- b. Sebagai pihak eksternal dalam rangka mencari tahu tentang pencegahan *fraud* pada Bank Perkreditan Rakyat.

### 1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan akan diuraikan mengenai penjelasan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan mengenai teori, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini termuat penjelasan mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi masing-masing variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data beserta metode pengumpulan data dan teknik analisis data.



**BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini termuat populasi dan sampel yang akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

**BAB V KESIMPULAN**

Pada bab ini termuat kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah beserta kebertasan penelitian serta saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.